

**STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

Deka Hutami Wijayanti



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK
STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Deka Hutami Wijayanti

Penelitian ini berfokus pada pemilihan prioritas strategi terbaik bagi wilayah Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pembangunan wilayahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan QSPM. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen kuisisioner, yaitu kuisisioner SWOT dan kuisisioner QSPM. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembangunan wilayah yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan dan pemeratakan kualitas sumberdaya manusia guna tidak mudah terprovokasi pihak luar yang mampu menimbulkan instabilitas wilayah.

Kata kunci: Pembangunan Wilayah, QSPM., Strategi Kebijakan, SWOT.

ABSTRACT

REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY OF PRINGSEWU DISTRICT LAMPUNG PROVINCE

By

Deka Hutami Wijayanti

This research focuses on selecting the best strategy priorities for Pringsewu District in developing its region, using the SWOT and QSPM analysis approaches. This study uses two questionnaire instruments, namely SWOT questionnaire and QSPM questionnaire. This research concludes that the regional development strategy that must be prioritized is to improve and evenly distribute the quality of human resources so that it is not easily provoked by outsiders who are able to cause regional instability.

Keywords: Policy strategy, QSPM, Regional development, SWOT.

**STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Deka Hutami Wijayanti

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH
KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Deka Hutami Wijayanti**

No. Pokok Mahasiswa : 1511021079

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



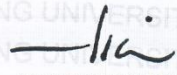
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

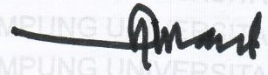
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

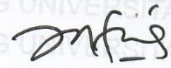
Ketua : Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E.



Penguji I : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.



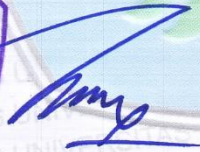
Penguji II : Emi Maimunah, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 19870 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 November 2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2019
Penulis,



Deka Nutami Wijayanti

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Pringsewu tanggal 19 April 1997 dan merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Sukatman dan Kamsinah. Pendidikan pertama penulis adalah Taman Kanak-kanak (TK) Aisiyah Tambah Sari Gadingrejo Pringsewu tahun 2002, dilanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SD N) 4 Gadingrejo, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 1 Gadingrejo dan lulus pada tahun 2012, yang kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pringsewu, selama pendidikan SMA penulis mengikuti berbagai kegiatan organisasi, salah satu organisasi penulis adalah penulis pernah mengikuti modern dance dan penulis lulus dari SMA pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yaitu Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui tahapan test, yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis juga bergabung dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) dan ikut serta menjabat sebagai sekertaris *public relation* di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKMF) *Economic English Club* periode 2017/2018. Pada tahun 2017 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) yang dilaksanakan oleh HIMEPA bertempat di berbagai instansi yang berada di Ibukota Jakarta dan pada tahun 2018 penulis

melakukan Kuliah Kerja Nyata selama 32 hari yang ditempatkan di Desa Sukacari
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

Jika kau ingin memenangkan sesuatu dalam hidup, cukup dengar kata hatimu, jika hatimu tidak mampu menjawabnya, lalu pejamkanlah matamu, sebut nama ayah, sebut nama ibu, dan percayalah semua rintangan akan terlewati, semua masalah lenyap seketika dan kemenangan akan menjadi milikmu, hanya milikmu.

(Shahrukh Khan)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ku ini kepada :

Kedua orang tua yang amat ku cinta. Terimakasih Ayah dan Ibu yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada henti dalam waktu suka maupun duka, selalu menjadi pendengar dan pemberi solusi terbaik disaat semangat sudah mulai goyah, selalu memberikan dan memprioritaskan apa saja yang menjadi kepentingan diriku, selalu memanjakanku dan tidak pernah lelah menghadapi tingkahku yang sangat kekanak-kanakan. Terima kasih segalanya yang tidak mampu untukku membalasnya.

Kepada seluruh keluargaku abang , ayuk yang aku sayangi. Agung dan Dian yang selalu memberikan suport , terimakasih selalu menjadi tempatku mengadu dan mengeluh, terima kasih selalu memberikan cinta, motivasi dan kasih sayang kepadaku. Kepada kakak-kakak iparku, Dewi dan Windu dan keponakan-keponakan ku, Arya dan Athala terimakasih sudah menjadi penghibur dikala sedih.

Kepada dosen-dosen jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan khususnya dosen pembimbing skripsi saya Ibu Dr. Lies Maria Hamzah, S.E.,M.E yang telah sabar membimbing dan mengarahkan saya sehingganya saya mampu menyelesaikan penelitian ini, dan dosen pembimbing akademik saya bapak Prayudha Ananta S.E, M.Si. yang sudah memberi arahansaya dari semester satu hingga semester akhir dan memberikan gagasan serta ide dari judul penelitian ini, dan sahabat-sahabat terbaik yang turut memberikan saran, motivasi, juga doa yang menambahkan semangat dalam penyelesaian penelitian ini, serta almamater tercinta Universitas Lampung yang selalu ku banggakan.

SANWACANA

Segala puji syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sungguh, tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan keteladan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maemunah, S.E.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Lies Maria Hamzah, S.E.,M.E selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pembelajaran, motivasi dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis.

5. Bapak Dr. Toto Gunarto S.E.,M.Si , Bapak Muhidin Sirat, S.E.,M.P dan Ibu Emi Maemunah, S.E.,M.Si selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan masukan kritik dan saran yang bermanfaat untuk penulis.
6. Bapak Prayudha Ananta, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari semester awal hingga semester akhir.
7. Staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu yang telah memberikan cinta dan segalanya demi kebaikanku.
9. Kakak-kakakku tersayang Agung Nanda Saputra, S.E dan Tysna Dian Ekawati A.Mdyang selalu memberikan motivasi dan penghibur dikala suka maupun duka.
10. Keponakan-keponakan Nararya Adiatma Wijaya dan Athala Elsharawy Sanjaya yang selalu menjadi penghibur disaat lelah.
11. Sahabat ku dari SMP, SMA, dan sampai jenjang Perguruan Tinggi Dedew , Nope, dan Nisa.
12. Teman-teman 18 Presidium EEC 2017/2018 Elia, Risna, Tisel, Putri, Ayu, Suci, Dicky, Silfy, Naditra, Fajrihansyah, Dieky, Dwi, Muda, special Gustipikan selaku Kadiv yang selalu sabar Suci R, dan yang terakhir Erick yang luar biasa menghibur dalam setiap keadaan.

13. Kakak tingkat terbaik Delia Septi Novita yang selalu menemani dan membantu dalam proses penyelesaian berkas dari mulai seminar hingga proses ujian sidang akhir.
14. Teman-Tema G Squad tercinta Viralia, Bella, Vido, Taufik, Bude Tika, Tyas, Kevin dan anggota baru Reza.
15. Teman-teman satu bimbingan Ganis Kesuma yang selalu sabar suport, Syahkurnia, Eka, dan Kak Ade Lestari.
16. Teman-teman mata kuliah ekonometrika 2 yang selalukompak dalam menyelesaikan tugas nanda, silvi, syahkurnia, dan isnaini.
17. Teman-teman KKN Desa Sukacari Kecamatan Batang Hari Nuban Andi, Bule, Uwo, Rohma, Adi, dan Candra.
18. Teman-teman EP Komek 2015 Dimas, Indah, Shaula, Ganis, Dona, Yohana, Mat Amin, dan Raffi Sahli.
19. Seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2015 dan 2014.
20. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, September 2019
Penulis,

Deka Hutami Wijayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Peneliti.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Dasar Perwilayahan	14
B. Teori Pusat Pertumbuhan	15
C. Perencanaan Pembangunan	16
D. Teori Pembangunan Ekonomi	20
E. Teori dan Konsep Dasar Pembangunan Wilayah	23
F. Penelitian Terdahulu.....	27
G. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	35
D. Metode Analisis Data	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Gambaran Umum Wilayah..... 47
B. Perumusan Strategi..... 62
C. Tahap Pengambilan Keputusan..... 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan..... 82
B Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Panjang Jalan Kabupaten Pringsewu.....	10
2. Kerangka Berpikir.....	33
3. Grafik Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan	53
4. Grafik Banyaknya Unit Usaha dan Tenaga Kerja.....	54
5. Grafik Banyaknya Unit Usaha dan Tenaga Kerja.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Kecamatan dan Luas Wilayah.....	7
2. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan	9
3. PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Pringsewu	11
4. Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal Wilayah.....	38
5. Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal Wilayah.....	38
6. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal	40
7. Matriks Evaluasi Faktor Internal.....	40
8. Matrik SWOT.	44
9. Matrik QSPM.....	46
10.Komposisi Penduduk Per Kecamatan.....	49
11.Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah)..	50
12.Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas.....	51
13.Ketersediaan Fasilitas kesehatan	52
14.Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum..	56
15.Identifikasi Perumusan Faktor Internal.....	63
16.Identifikasi Perumusan Faktor Eksternal..	64
17.Perumusan Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal..	67
18.Evaluasi Faktor Internal (IFE)..	68
19.Evaluasi Faktor Eksternal (EFE).....	70
20. Matriks SWOT	71
21.Hasil Analisis QSPM dalam Perumusan Strategi	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Kuisisioner Pembobotan IFE dan EFE.	L-1
Lampiran 2. Kuisisioner Rating IFE dan EFE.....	L-7
Lampiran 3. Hasil Nilai Bobot IFE dan EFE	L-14
Lampiran 4. Hasil Rating IFE dan EFE	L-16
Lampiran 5. Matriks Swot Kabupaten Pringsewu	L-18
Lampiran 6. Hasil Perhitungan Matriks QSPM	L-20

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan baik yang bersifat perencanaan sektoral maupun regional mempunyai keterkaitan antar sektor maupun antar tingkat wilayah administrasi, yaitu antara perencanaan pusat dan regional. Perencanaan pembangunan ekonomi regional bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki pembangunan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Menurut Kuncoro (2004), ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang *realistic* memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di tempat daerah tersebut yang merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya administrasi proses pengambilan keputusan dan otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat.

Konsep pembangunan desentralisasi adalah konsep pembangunan yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia saat ini melalui otonomi daerah, dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang terdesentralisasi ini, maka pembangunan disetiap daerah otonom perlu dipersiapkan dengan penyusunan konsep pembangunan yang lebih matang yang sesuai dengan potensi, kendala dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap daerah otonom tersebut. Oleh karena itu setiap daerah akan memiliki prinsip yang berbeda dalam mengimplementasikan konsep dan strategi pembangunannya.

Menurut Kuncoro (2004), tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Ini dimaksudkan untuk mencari bentuk susunan dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan pembangunan. Pada akhirnya pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah akan bersifat spesifik dan diharapkan unggul secara kompetitif (unggul dalam harga) maupun komparatif (unggul dalam sumberdaya) di bidang-bidang perekonomian tertentu.

Pemilihan aktifitas disetiap wilayah merupakan suatu syarat untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain. Keberhasilan peningkatan tersebut merupakan modal penting bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan, mengisi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip otonomi daerah secara langsung, nyata dan bertanggung jawab sehingga penerapan otonomi daerah akan memberi dampak positif yang besar bagi pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat luas (Kuncoro,2004).

Penerapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah membuat pemerintah daerah sibuk mengatur daerahnya masing-masing agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan menerapkan *system* demokrasi yang menekankan pada pemerintahan desentralisasi. Menurut Koswara (1999), tujuan pokok undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menjadi daerah otonom yang mandiri.

Keberhasilan pembangunan kegiatan ekonomi didukung oleh potensi masing-masing wilayah. Dalam pembangunan dan pengembangan wilayah dimulai dari orde terkecil yaitu kecamatan, kabupaten, provinsi dimana harus mempunyai keterkaitan yang jelas dan searah dalam pengembangan potensi perekonomian wilayah sehingga tidak terjadi dualisme kebijakan yang dikenal dengan "*bottom up*" dan "*top down*". Hal ini sangat penting karena setiap wilayah mempunyai perbedaan potensi sumber daya alam, aksesibilitas terhadap faktor produksi serta

ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung suatu kegiatan. Model pembangunan yang “*bottom up*” menunjukkan pembangunan yang didukung penuh oleh kemampuan wilayah bawah. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas. Inilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi (Kunarjo, 2002).

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tanggamus dan menjadi salah satu dari tiga kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Awal dibentuknya Kabupaten Pringsewu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008. Keberadaan Kabupaten Pringsewu adalah kabupaten yang tergolong masih muda maka dari itu, Kabupaten Pringsewu hanya memberikan kontribusi sebesar 3.57 persen dari total produk domestik bruto (PDRB) Provinsi Lampung pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2015). Perkembangan dan kemajuan baik dari sisi ekonom, sosial, dan politik menuntut pembangunan-pembangunan baru untuk dijadikan tempat beroperasinya berbagai sektor perekonomian.

Pesatnya kemajuan dan perkembangan Kabupaten Pringsewu diawali dengan proses pemekaran wilayah menjadi daerah otonom tingkat kabupaten pada tahun 2008, yang sebelumnya daerah Pringsewu masuk dalam daerah administratif Kabupaten Tanggamus. Kondisi demikian menyebabkan pembangunan fisik terbangun secara sporadis dan mengalami perluasan areal perkotaan. Perubahan

tersebut dapat berupa perubahan fisik dan non fisik. Perubahan fisik dapat dilihat dari lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun yang merupakan indikasi adanya pengaruh dari kegiatan ekstensifikasi perkembangan kota. Sedangkan perubahan non fisik dapat dilihat di pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan aktifitas perekonomian (mata pencaharian non agraris).

Berkaitan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju ke perkembangan wilayah yang lebih baik. Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah menuntut pihak pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan aspek demokrasi, transparansi, keadilan dan pemerataan serta potensi daerah. Era reformasi otonomi daerah paradigma baru dalam pembangunan daerah, keberhasilan paradigma tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.

Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Agar mampu memenuhi kriteria luas dan strategi tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diawali berdasarkan prioritas dan pemilihan sasaran-sasaran yang mempunyai nilai strategis dan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kemajuan Kabupaten Pringsewu dalam

membangun sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu.

RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang ada, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Menurut RPJMD Kabupaten Pringsewu tahun (2017-2022), Pelaksanaan pembangunan wilayah memerlukan strategi yang harus disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik lokal, isu strategis atau permasalahan yang dihadapi serta potensi yang tersedia di wilayah tersebut. Strategi pembangunan wilayah yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu(RPJMD Kabupaten Pringsewu 2017-2022) sebagai berikut :

1. Strategi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat secara merata
2. Strategi Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas religius dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan keagamaan dan sosial masyarakat
3. Strategi meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan gender
4. Strategi mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan secara berkualitas dan berwawasan lingkungan

5. Strategi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih dalam situasi yang kondusif

Kabupaten Pringsewu memiliki letak yang strategis di Jalur Lintas Barat yang merupakan salah satu jalur tesibuk di Provinsi Lampung menuju sejumlah provinsi di pantai barat sumatera, membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa, baik usaha perdagangan kecil, menengah maupun usaha perdagangan besar (RPJMD Kabupaten Pringsewu 2017-2022). Luas wilayah Kabupaten Pringsewu adalah 625km² yang hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan.

Tabel. 1 Daftar Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu

No	Nama Kecamatan	Ibukota	Jumlah Pekon	Luas (km)2
1	Pardasuka	Pardasuka	13	94,64
2	Ambarawa	Ambarawa	8	30,99
3	Pagalaran	Pagalaran	22	63,28
4	Pagalaran Utara	Fajar Mulya	10	109,47
5	Pringsewu	Pringsewu	13	53,29
6	Gadingrejo	Gadingrejo	23	85,71
7	Sukoharjo	Sukoharjo	16	72,95
8	Banyumas	Banyumas	11	39,85
9	Adiluwih	Adiluwih	13	75,82
	Jumlah	9	131	625

Sumber: *BPS Kabupaten Pringsewu*

Wilayah Kabupaten Pringsewu mulai tahun 2013 telah dimekarkan yang terdiri dari 5 kelurahan serta 126 pekon (desa). Berdasarkan tabel di atas diketahui luas kecamatan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah Kecamatan Pagelaran Utara yang memiliki luas 109,47 km² atau 17,52% dari luas Kabupaten Pringsewu. Hal ini dikarenakan Kecamatan Pagelaran Utara terdapat kawasan hutan dan lahan perkebunan rakyat atau lahan kering yang relatif luas. Kondisi yang sama juga terdapat di Kecamatan Pardasuka 15,14%, di mana luas lahan terbesar dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat. Sedangkan luas kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Ambarawa sebagai pemekaran dari Kecamatan Pringsewu.

Perkembangan wilayah perkotaan berada di Kecamatan Pringsewu dengan luas wilayah 53,29 km² atau 8,53% dari luas Kabupaten Pringsewu. Perkembangan Kecamatan Pringsewu memberikan dampak positif bagi perkembangan pada empat kecamatan yang mengapitnya yaitu, di sebelah utara Kecamatan Sukoharjo, di sebelah selatan Kecamatan Ambarawa di sebelah barat Kecamatan Pagelaran dan di sebelah timur Kecamatan Gadingrejo (RPJMD Kabupaten Pringsewu 2017-2022).

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang tergolong masih banyak menemui kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga menyebabkan realisasi pembangunan daerah masih belum sesuai harapan. Masalah pembangunan yang terjadi di Kabupaten Pringsewu menurut sumber Statistik Daerah Kabupaten Pringsewu, bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat masih sangat terbatas. Dari fasilitas kesehatan terdapat 465 fasilitas yang terdapat di Pringsewu fasilitas kesehatan yang paling banyak adalah posyandu dan

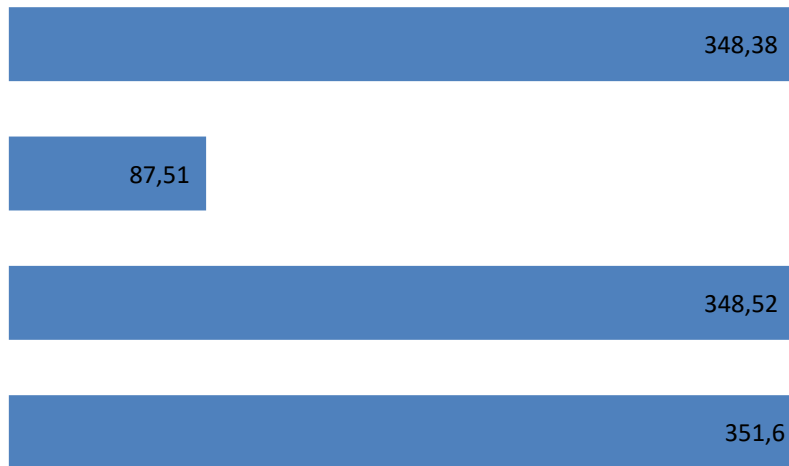
puskesmas. Dengan 342 posyandu, 12 unit puskesmas induk dibantu oleh 34 unit puskesmas pembantu diharapkan dapat melayani seluruh penduduk sampai dengan pelosok-pelosok desa terpencil. Dengan kurangnya fasilitas dari sarana kesehatan menyebabkan belum optimalnya pencapaian derajat kesehatan masyarakat dan gizi masyarakat. Hal ini terlihat dari usia harapan hidup tahun 2016 baru mencapai 68,88 pertahun atau masih di bawah rata-rata provinsi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2016).

Tabel. 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes
Pardasuka			1	38	2	
Ambarawa			1	39	2	
Pagalaran	1		2	50		
Pagalaran Utara			1	19		
Pringsewu	5		2	37	2	
Gadingrejo	1		2	46	3	
Sukoharjo			1	53	3	
Banyumas			1	25	1	
Adiluwih			1	35	2	
Jumlah Total	7		12	342	15	

Pembangunan jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat, di mana untuk saat ini daerah-daerah di Pringsewu hanya ditunjang oleh transportasi darat. Dengan berkembangnya Pringsewu menjadi kabupaten sendiri masih banyak kondisi jalan yang mengganggu kenyamanan para pemakai jalan. Kondisi jalan yang rusak dan rusak berat hampir mencapai 56% dari seluruh total panjang jalan yang terdapat di Pringsewu. Sedangkan kondisi jalan yang dikatakan baik jumlahnya tidak

mencapai 20 persen. Grafik panjang jalan Kabupaten Pringsewu menurut kondisi jalan di Kabupaten Pringsewu tersaji dalam Gambar. 1



Gambar. 1 Grafik Panjang Jalan Kabupaten Pringsewu Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Pringsewu.

Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Pringsewu (2016), Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu tahun 2016 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 5,04 persen dibanding tahun sebelumnya 5,22 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha, 6 kategori mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, sementara 11 kategori lainnya menunjukkan perlambatan. Keenam kategori tersebut adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori pertambangan dan pengalihan, kategori sampah, kategori limbah dan daur ulang, kategori konstruksi, kategori perdagangan besar dan eceran, kategori reparasi mobil dan kategori jasa keuangan dan asuransi.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha Industry		2014	2015	2016
1		2	3	4
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.981.669,78	2.096.782,63	2.296.998,45
B	Pertambangan dan Penggalian	6.499,90	7.937,04	9.267,14
C	Industri Pengolahan	1.109.415,01	1.262.591,12	1.355.338,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.705,26	3.556,25	5.124,81
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4.222,68	4.622,02	4.966,06
F	Konstruksi	886.772,38	937.250,17	1.080.578,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.002.769,22	1.085.118,36	1.203.309,65
H	Transportasi dan Pergudangan	294.366,18	358.331,46	406.796,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	173.969,19	202.114,49	230.4446,18
J	Informasi dan Komunikasi	359.791,85	422.619,21	486.744,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	328.054,66	330.458,39	363.140,76
L	Real Estate	277.727,57	297.177,83	327.726,82
M	Jasa Perusahaan	18.965,50	20.859,30	23.830,11
N	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	342.008,48	372.022,80	402.127,88
O	Jasa Pendidikan	392.921,02	430.438,02	469.967,73
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.959,61	117.782,94	132.015,76
Q	Jasa Lainnya	72.787,58	87.294,50	96.979,48

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi pembangunan yang terarah yang disesuaikan dengan potensi dan persebaran sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu. Pembangunan wilayah di Kabupaten Pringsewu membutuhkan suatu analisis yang rasional dan obyektif, selanjutnya hasil dari analisis tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan guna membuat kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut sangat dibutuhkan sebagai arahan koordinasi program-program pembangunan

daerah lintas sektoral dan sub sektor sekaligus sebagai informasi penting bagi pihak lain(*stakeholders*) tentang pola pembangunan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan menganalisis “Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung”. Strategi penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, di bawah kendala keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dapat digunakan. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis akan mencoba membahas beberapa teknik dan menggunakan alat dalam menganalisis struktur ekonomi daerah dengan melihat pada masing-masing sektor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal berupa faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman bagi Kabupaten Pringsewu dalam memacu pembangunan ekonomi Propinsi Lampung ?
2. Bagaimana merumuskan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Pringsewu dalam menunjang pembangunan ekonomi Propinsi Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan internal dan eksternal berupa faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman bagi Kabupaten Pringsewu.
2. Merumuskan strategi pembangunan wilayah kabupaten dalam memacu perekonomian Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan Bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan dan penentuan strategi kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Pringsewu dalam memilih kebijakan yang tepat dan dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lain di masa mendatang yang mengambil topik yang berkaitan ataupun bagi pihak lain yang tertarik dengan permasalahan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dasar Perwilayahan

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Menurut Glasson dalam Tarigan (2009), menyatakan terdapat dua cara pandang tentang wilayah yaitu pandangan subyektif dan pandangan obyektif. Cara pandang subyektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Wilayah hanyalah suatu model agar dapat membedakan satu lokasi dengan lokasi lainnya. Sedangkan pandangan obyektif menyatakan bahwa wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri atau gejala alam disetiap wilayah (misalnya dari unsur musim atau temperatur, topografi, jenis tumbuhan, kepadatan penduduk, dan sebagainya atau gabungan dari unsur atau ciri tersebut).

Wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisi dan fungsinya, berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keragaman isi (homogeneity) misalnya: wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya suatu wilayah dapat dibedakan misalnya wilayah kota dengan wilayah dibelakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, jenjang atau hierarki jalur transportasi dan sebagainya. Glasson dalam (Tarigan, 2009).

B. Teori Pusat Pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan atau yang lebih sering dikenal dengan teori kutub pertumbuhan (*growth pole*) adalah suatu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara menularkan perkembangan wilayah dari pusat ke pinggiran (*center down development*). Perroux dalam (Arsyad,1999). Perroux menyebutkan bahwa pertumbuhan tidak bisa terjadi di mana saja dan pada waktu yang bersamaan. Pertumbuhan hanya dapat terjadi pada tempat-tempat tertentu yang disebut dengan kutub pertumbuhan, dengan intensitas yang berbeda-beda.

Glasson (1977), lebih menekankan kutub pertumbuhan dalam dimensi ruang ekonomi, atau dengan kata lain kutub pertumbuhan adalah medan kekuatan ekonomi yang mengandung pusat-pusat dan kutub-kutub serta mempunyai kekuatan sentrifugal yang memencar sekelilingnya dan kekuatan sentripetal yang menarik kawasan sekitarnya kepusat-pusat tersebut. Tiap-tiap pusat merupakan penarik dan penolak serta mempunyai medan sendiri dalam suatu gugus medan pusat-pusat yang lain. Oleh karena itu konsep kutub pertumbuhan mempunyai ikatan dengan ruang ekonomi secara abstrak dan tidak adanya keterkaitan dengan ruang geografi. Tiga ruang abstrak itu terdiri dari:

- (a) ruang yang ditentukan oleh rencana,
- (b) ruang sebagai media kekuatan-kekuatan, dan
- (c) ruang sebagai suatu keadaan yang homogen.

Tetapi apabila kutub pertumbuhan didefinisikan sebagai suatu kekuatan geografi tertentu maka istilah pusat pertumbuhan lebih tepat digunakan dari pada kutub pertumbuhan. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan yang didukung oleh

perusahaan yang propulsif akan berimplikasi pada peningkatan permintaan terhadap daerah belakangnya, yang jelas peningkatan ini berlangsung dalam konteks keterkaitan. Dengan demikian perkembangan pusat pertumbuhan pada dasarnya akan menimbulkan perkembangan daerah pengaruhnya juga. Disamping itu perkembangan pusat pertumbuhan tidak menutup kemungkinan untuk memberi efek pada daerah belakangnya. Sebagai contoh adalah tertariknya tenaga-tenaga potensial dan modal dari daerah belakang ke pusat pertumbuhan.

C. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan didefinisikan sebagai suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dan beberapa variabel utama perekonomian nasional (Michael Todaro, 2002).

Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat tingkat pusat dan daerah. Komponen utama perencanaan pembangunan adalah :

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan.
2. Mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan.

3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kemudian apabila dikaitkan dengan arti dan fungsi suatu perencanaan, maka Tjokroamidjoyo (1996) mengemukakan tentang arti dan fungsi perencanaan tersebut, yaitu :

1. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Perencanaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan di capai, bagaimana, bila dan oleh siapa.

Perencanaan adalah suatu paradoks, artinya semakin dibutuhkan semakin kurang kemampuan lembaga untuk melakukannya. Di satu pihak perencanaan makin esensial jika jika kelangkaan sumberdaya dan kegunaan strateginya makin besar. Dipihak lain justru kelangkaan ini pula yang membuat perencanaan formal makin sulit. Perencanaan harus bersifat interdisiplin dan mencakup perencanaan sosial dan ekonomi, mencari jalan keluar untuk menggabungkan informasi sosial dalam proses perencanaan tersebut. Pada hakekatnya perencanaan adalah upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitasnya membuat pilihan guna

mempertimbangkan dan menentukan pilihan atau alternatif yang akan ditempuhnya. Tugas demikian merupakan jantung proses pembangunan (Bryant and White 1987).

a. Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal sarana dan prasarana pembangunan transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas (Arsyad, 1999).

Menurut Arsyad, permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeuos development*) dengan menggunakan sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerahtersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi.

b. Otonomi Daerah

Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat tanggal 1 Januari 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural, karena sentralisasi (kontrol dari pusat)nyang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia (Kuncoro,1995). Sentralisasi birokrasi maupun

konsentrasi geografis aktivitas bisnis ke arah pusat kekuasaan dan modal menjadi keniscayaan. Tak pelak, pembangunan pun bias ke Kawasan Barat Indonesia, khususnya Jawa dan daerah metropolitan (Kuncoro,2002).

Penerapan (pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatnegeraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Pemerintah daerah dapat bebas berekspresi dan berkreasi

dalam rangka membangun daerahnya sendiri, tentu saja harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari desentralisasi diharapkan :

1. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik
2. Keadilan sosial
3. Pemerataan wilayah daerah
4. Mendorong pemberdayaan masyarakat
5. Menjaga hubungan baik antara pusat dan daerah, antar pusat serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI
6. Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi
7. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
8. Untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

D. Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut akademisi ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju

menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti ;ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi (Arsyad, 1999).

Jhinghan (2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya.
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.

3. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.
6. Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
7. Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan. Aryad (1999) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ditujukan secara utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah lebih ditujukan pada urusan peningkatan kualitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

ekonomi yang optimal, perluasan tenaga kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

E.Konsep Pembangunan Wilayah

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, dan yang ada di atas permukaan bumi (Tarigan, 2005).

Di dalam pandangan ini juga dinyatakan bahwa wilayah bisa dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimiliki atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan dari ciri-ciri di atas. Lebih lanjut menurut Tarigan (2005) dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wilayah administrasi Pemerintah, di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan Pemerintah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan dusun/lingkungan.
2. Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik, misalkan wilayah pertanian dengan wilayah industri dan wilayah perkotaan dengan daerah pedalaman. Cara pembagian lainnya juga berdasarkan kesamaan sosial budaya. Misalkan, daerahdaerah dibagi menurut suku mayoritas, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.

3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu diterapkan terlebih dahulu pusat pertumbuhan (growth pole atau growth centre) yang kira-kira sama besarnya/rangkingnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan.
4. Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan atau tujuan khusus. Sedangkan pembangunan menurut Sajogyo (1985) diartikan sebagai suatu proses yang menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (growth) ataupun perubahan (change) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini tidak lain merupakan gambaran umum masyarakat luas (society). Tjokromidjojo (1979) mengemukakan bahwa pembangunan wilayah erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan.

Konsep pembangunan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang dinamis. Dengan kata lain, konsep pembangunan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang selalu berkembang yang telah diujiterapkan. Selanjutnya dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, bongkar pasang konsep pembangunan wilayah di Indonesia terdapat beberapa landasan teori yang turut mewarnai keberadaannya.

Pertama adalah Walter Isard sebagai seorang pelopor ilmu wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab dan akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era 1950 an) yang memunculkan teori *polarization effect* dan *trickling down effect* dengan argumentasi bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (*unbalanced development*). Ketiga adalah Myrdal (era 1950 an) dengan teori yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah *backwash effect* dan *spreadwash effect*. Keempat adalah Freadmann (era 1960 an) yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Kelima adalah Douglass (era 70 an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*) dalam pengembangan wilayah.

Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah di atas kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran putra-putra bangsa. Diantaranya adalah Sutami (era 1970 an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kotakota dan hirarki prasarana jalan melalui orde kota. Selanjutnya adalah Ruslan Diwiryo (era 1980 an) yang memperkenalkan konsep pola dan struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No 24/1992 tentang penataan ruang. Pada periode 80 an ini pula, lahir strategi nasional pembangunan perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan sistem kota nasional yang efisien dalam

konteks pengembangan wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini pula menjadi cikal bakal lahirnya konsep program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota yang diarahkan dalam SNPP. Pada era 90 an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antara kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abad millenium bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemahaman teoritis dan pengalaman empiris di atas, maka secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tuajuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI. Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumberdaya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

F. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang menggunakan pendekatan SWOT untuk menentukan strategi pembangunan daerah dalam menganalisis pembangunan suatu wilayah. Metode ini kerap dilakukan agar pembangunan disuatu wilayah tepat dan sesuai dengan prioritas pembangunan wilayah antara lain :

Penelitian Yunizar (2013), Strategi Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Minapolitan Di Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya perikanan di wilayah Anambas dan merumuskan strategi pengembangan wilayah melalui pendekatan minapolitan. Metode analisis berupa Analisis Deskriptif, Location Quotient (LQ), Analisis internal dan eksternal (IFE-EFE) serta analisis Strengths Weaknesses Opportunities Threat (SWOT), dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) diperoleh urutan prioritas strategi yakni: 1) Membangun prasarana dan sarana sektor kelautan dan perikanan; 2) Membuat kajian dan perencanaan sektor kelautan dan perikanan; 3) Memprioritaskan program yang mendukung minapolitan; 4) Meningkatkan pembinaan dan keterampilan nelayan; 5) Menetapkan Anambas sebagai kawasan minapolitan melalui regulasi pemerintah pusat; dan 6) Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai lembaga.

Penelitian Teti Sri Kusvita (2013), Evaluasi dan Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Bogor, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan dan keberlanjutan program pengembangan kawasan minapolitan, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan minapolitan di Kabupaten Bogor, dan

merumuskan strategi dan program untuk meningkatkan kinerja program pengembangan minapolitan.

Analisis terhadap faktor eksternal dan internal dalam matrik SWOT melahirkan 7 alternatif strategi dalam pengembangan Kawasan Minapolitan di masa yang akan datang. Selanjutnya prioritas strategi tertinggi pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor ditentukan melalui analisi Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (Quantitative Strategic Planning Matrix-QSPM) yang menghasilkan tiga strategi utama yaitu: (1) Pengembangan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Produk; (2) Peningkatan Kapasitas Produksi; dan (3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penunjang. Hasil penelitian menghendaki penyusunan program dan kegiatan oleh instansi terkait diarahkan untuk mendukung strategi tersebut.

Penelitian Basuki Rahmat (2009), Strategi Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pegunungan dan Pesisir Kabupaten Lampung Barat, dalam penelitiannya untuk merumuskan strategi dan program pengembangan produk unggulan di Kabupaten Lampung Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis LQ, metode skalogram, SWOT, dan QSPM. Hasil analisis skalogram dan LQ serta kondisi wilayah didapat kesimpulan kopi robusta dapat diprioritaskan sebagai produk unggulan wilayah pegunungan dan ikan merupakan produk unggulan untuk wilayah pesisir. Hasil analisis SWOT dan QSPM didapat 9 strategi pengembangan produk unggulan Kabupaten Lampung Barat. Hasil analisis QSPM terdapat dua grand strategi yakni pengembangan kompetensi daerah dan pengembangan kemitraan dengan swasta/lembaga lain.

Penelitian Abdul Wahid (2006), Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat), dalam penelitian ini menjelaskan perumusan strategi dengan mengidentifikasi tingkat ketimpangan potensi fisik wilayah dan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Garut. Metode analisis berupa analisis sistem hirarki potensi fisik wilayah (HFP), sistem hirarki tingkat pemerataan pembangunan, metode skalogram, sistem limpitan sejajar dan strategis, serta analisis matriks IFE, EFE, SWOT, dan QSP.

Menghasilkan kesimpulan Berdasarkan analisis faktor eksternal bahwa dalam pembangunan daerah tertinggal, menunjukkan Kabupaten Garut sedang berusaha untuk memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman (2.547). Hasil analisis faktor internal menunjukkan bahwa Kabupaten Garut belum sepenuhnya mampu untuk mengatasi kelemahan dan menggunakan kekuatan untuk pembangunan daerah tertinggal (2.362). Berdasarkan analisis matriks QSP yang di dapat dari analisis matriks SWOT, maka prioritas alternatif strategi yang terpilih yaitu : 1) meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan; 2) strategi pembangunan sarana dan prasarana; 3) memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis pedesaan; 4) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara adil dan transparan.

Penelitian Siti Nurjanah (2006), Strategi Pembangunan Wilayah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten), dalam penelitiannya ini untuk merumuskan strategi yang harus disusun oleh stakeholders dalam pembangunan

wilayah tertinggal Kabupaten Pandeglang. Perumusan strategi ini didukung dengan mengidentifikasi sektor unggulan, hirarki pusat pertumbuhan dan pelayanan serta hirarki potensi sumberdaya wilayah. Metode analisis berupa analisis LQ, metode skalogram, sistem hirarki potensi sumberdaya wilayah sistem limpitan sejajar serta analisis matriks IFE, EFE, SWOT, dan QSPM.

Menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT diperoleh 10 alternatif strategi dalam rangka pembangunan wilayah tertinggal Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil analisis Matriks QSPM, strategi yang menjadi prioritas utama adalah strategi meningkatkan potensi sumberdaya yang dimiliki (SDA, letak geografis dan keadaan biofisik) untuk menarik investor dan kemitraan/kerjasama dari pihak swasta atau pihak lain. Sedangkan strategi yang menempati prioritas akhir adalah strategi pemberdayaan kelembagaan, aparatur dan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemitraan/kerjasama dengan pihak swasta ataupun pihak lain.

Penelitian Rizki Rahajuning Tyas (2006), menunjukkan bahwa strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, dalam penelitiannya tentang strategi pembangunan yang terarah disesuaikan dengan potensi wilayah di Kabupaten Situbondo untuk mengidentifikasi penyebaran sarana dan prasarana pembangunan, mengidentifikasi kondisi lingkungan internal dan eksternal pembangunan, serta merumuskan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Situbondo. Metode analisis berupa analisis LQ, analisis skalogram, Matriks IFE, EFE, SWOT, dan QSP.

Menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT diperoleh 12 alternatif strategi yang dirumuskan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil analisis Matriks QSP strategi yang menjadi prioritas utama, adalah strategi meningkatkan potensi SDA dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, strategi meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA serta pengembangan Litbang melalui pemanfaatan teknologi.

Penelitian Asri Dwi Asmarani (2010), Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT Dan AHP, berfokus pada pemilihan strategi terbaik bagi Kabupaten Klaten dalam melakukan pembangunan daerahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen kuisisioner, yaitu kuisisioner SWOT dan kuisisioner AHP. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.

Sebagai acuan pada penelitian terdahulu, maka penelitian ini bermaksud untuk merumuskan strategi-strategi pembangunan wilayah dan melihat bagaimana implementasi dari strategi pembangunan tersebut dengan menggunakan analisis SWOT serta melihat penyebaran sarana dan prasarana dalam mengidentifikasi pembangunan wilayah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus pada penetapan strategi-strategi pembangunan dengan melihat penyebaran sarana dan fasilitas pendukung pembangunan dan melihat kebijakan-kebijakan pembangunan

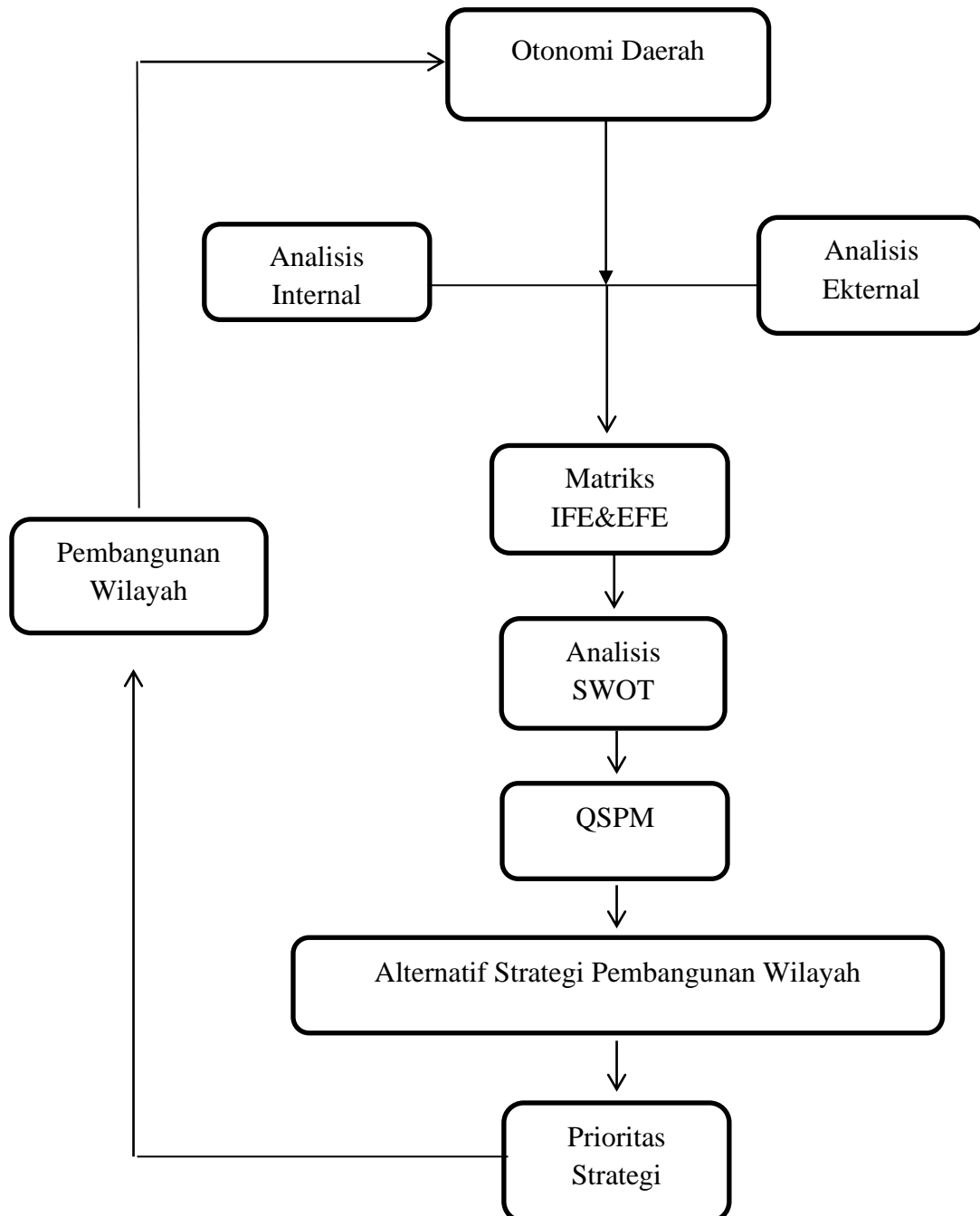
yang mendukung perekonomian serta implementasi strategi kebijakan tersebut terhadap pembangunan wilayah penelitian, sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menganalisis peranan sektor basis pertanian dalam perekonomian suatu daerah dalam pembangunan wilayah dan serta analisis strategi pengembangan perusahaan.

G .Kerangka Berfikir

Terpusatnya kewenangan dengan adanya sentralisasi di pemerintahan pusat menyebabkan suatu daerah tidak dapat secara leluasa menggali dan mengelola potensi wilayahnya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Sehingga menuntut adanya suatu otonomi daerah yang dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah ini, maka pelaksanaan pembangunan di setiap daerah dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintahan lokal sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang menerapkan sistem demokrasi dengan menekankan pada pemerintahan yang sentralisasi.

Pemerintah lokal mengatur tataruang daerahnya yang meliputi kegiatan ekonomi wilayah dan mengatur struktur organisasi tataruang Penelitian ini menggunakan dua alat analisis yaitu pendekatan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam bentuk matriks IFE dan matriks EFE. Hasil dari identifikasi matriks ini digunakan untuk menyusun suatu matriks SWOT yang akan menghasilkan berbagai alternatif strategi. Yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan matriks QSPM untuk mendapatkan strategi terbaik dari pembangunan wilayah di masa yang akan datang. Dan tahap terakhir

adalah menyusun strategi komprehensif pembangunan yang terdiri dari elemen misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program. Selanjutnya adalah tahap analisa kebijakan. Kerangka Pemikiran kajian ini tersaji dalam Gambar 1.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan daerah penelitian Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pemilihan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan kondisi geografis yang sangat mendukung, potensi ekonomi wilayah yang masih mungkin dapat digali lebih lanjut untuk dilakukan penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2019.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data sekunder dapat dipenuhi melalui penelusuran arsip dan pustaka milik dinas dan instansi setempat seperti dari BPS Kabupaten Pringsewu, Bappeda Kabupaten Pringsewu, dan instansi atau lembaga lain yang terkait dengan tujuan penelitian, dilengkapi sumber-sumber lain seperti dari internet, artikel-artikel, sedangkan data primer diperoleh dari observasi, wawancara kepada kepala bidang, staff dan pegawai daerah. Responden yang dipilih adalah merupakan perwakilan dari setiap instansi. Tahun awal data PDRB atas dasar harga konstan adalah pada tahun 2000 dimana pada tahun ini merupakan awal dari berlakunya otonomi daerah.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam pemilihan responden yaitu dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara sengaja (purposive sampling), yaitu menentukan atau memilih responden secara sengaja. Yang menjadi responden untuk melakukan pembobotan adalah seorang ahli (expert). Yang dimaksud dengan expert di sini tidak harus seseorang yang pakar pada satu bidang keilmuan tertentu, melainkan orang yang mengetahui benar akan permasalahan yang diteliti. Adapun responden yang dipilih yaitu dari perwakilan dari setiap masing-masing dinas dan instansi atau lembaga di Kabupaten Pringsewu yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini responden yang di pilih sebanyak sebelas responden diantaranya Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pertanian, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perikanan, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan, Dosen ekonomi perencanaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pringsewu, dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu.

D. Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode analisis, yaitu metode deskriptif dan metode kuantitatif. Pemakaian metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan keragaan pembangunan, keadaan umum wilayah, keadaan sosial ekonomi, potensi wilayah, dan lain-lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

A. Matriks EFI dan Matriks EFE

Matriks EFI dan EFE diperkenalkan oleh Fred R. Davis, Menurut David (2002),EFI (evaluasi faktor internal) merupakan alat untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam berbagai bidang fungsional dari suatu daerah dan juga memberikan dasar untuk mengendalikan dan mengevaluasi hubungan diantara bidang-bidang ini.Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal wilayah berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal wilayah dapat digali dari beberapa fungsional wilayah, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, sitem informasi dan operasional wilayah (Umar 2001).

Sedangkan matiks EFE (evaluasi faktor eksternal) merupakan alat untuk meringkas dan mengevaluasi peluang dan ancaman dalam berbagai bidang eksternal dari suatu daerah dan juga memberikan dasar untuk mengendalikan dan mengevaluasi hubungan diantara bidang-bidang ini . Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal wilayah. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik,pemerintahan, hukum, teknologi, di mana suatu wilayah berada, serta data eksternal relevan lainnya. Hal ini penting karena faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan (Umar,2001)

Menurut Umar 2001, Terdapat lima langkah dalam menyusun matriks EFE dan EFI, yaitu :

- 1) Buat daftar faktor-faktor internal yang diidentifikasi dalam proses audit internal. Cari antara 10 dan 20 faktor, termasuk kekuatan maupun kelemahan. Tuliskan kekuatan terlebih dahulu, kemudian kelemahan. Demikian juga untuk faktor eksternal, buat daftar faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi dalam proses audit eksternal. Cari antara 10 dan 20 faktor, termasuk peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan dan industrinya. Daftar peluang kemudian ancaman, usahakan sespesifik mungkin bisa menggunakan persentase, rasio, dan angka perbandingan.
- 2) Beri bobot pada setiap faktor dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). Bobot menunjukkan kepentingan relatif dari setiap faktor tersebut agar berhasil dalam industri. Jumlah seluruh bobot yang diberikan pada faktor di atas harus sama dengan 1,0. penentuan bobot dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor strategik internal dan eksternal tersebut kepada pihak *stakeholders* dengan menggunakan metode *paired comparison* dalam Nurjanah, (2006). Inti dari metode *paired comparison* adalah membandingkan secara bersamaan dua variabel yang terdapat dalam seperangkat variabel dan memilih salah satu variabel yang dinilai responden lebih penting melalui skala penilaian (Kinner, 1991 dalam Nurjanah, 2006).

Metode tersebut digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap faktor penentu internal dan eksternal. Untuk menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2, 3. Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah sebagai berikut:

- 1= jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal
 2= jika indikator horizontal sama penting daripada indikator vertikal
 3= jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal

Tabel. 4 Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal Wilayah

Faktor Strategi Internal	A	B	C	D	...	Total	Bobot
A	■						
B		■					
C			■				
D				■			
...					■		
Total							

Sumber : *David,2002*

Tabel. 5 Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal Wilayah

Faktor Strategi Eksternal	A	B	C	D	...	Total	Bobot
A	■						
B		■					
C			■				
D				■			
...					■		
Total							

Sumber : *David,2002*

Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus:

$$A_i = \frac{X_i}{\sum n X_i}$$

$$I = 1$$

Keterangan :

a_i = Bobot variabel ke-i

X_i = Nilai variabel ke i

$I = 1,2,3\dots n$

$n =$ Jumlah variabel

3) Tahap pemberian *rating* (nilai) antara 1 sampai 5 bagi masing-masing faktor yang memiliki nilai :

1 = kelemahan utama/mayor bagi pembangunan wilayah

2 = kelemahan kecil/minor bagi pembangunan wilayah

3 = kekuatan kecil/minor bagi pembangunan wilayah

4 = kekuatan sedang/mayor bagi pembangunan wilayah

5 = kekuatan utama/mayor bagi pembangunan wilayah

4) Kalikan setiap bobot faktor dengan peringkat untuk mendapatkan nilai yang dibobot

5) Jumlahkan nilai yang dibobot untuk setiap variabel untuk menentukan nilai yang dibobot total bagi organisasi. Total nilai yang dibobot tertinggi untuk suatu organisasi adalah 4,0 dan yang terendah adalah 1,0. rata-rata nilai yang dibobot adalah 2,5. untuk penilaian faktor eksternal, jumlah nilai yang dibobot sama dengan 4,0 menunjukkan bahwa suatu strategi pembangunan wilayah secara efektif memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalkan pengaruh negatif potensial dari ancaman eksternal. Jumlah nilai sama dengan 1,0 menunjukkan bahwa wilayah masih lemah dalam mengatasi ancaman eksternal dan belum dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Tabel. 6 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

Faktor-faktor Eksternal	Bobot (Xi)	Peringkat (Yi)	Nilai yang di bobot (XiYi)
Peluang			
1			
2			
...			
Ancaman			
1			
2			
...			
Jumlah	1,0		

Sumber: *David, 2002*

Untuk penilaian faktor internal, total nilai yang dibobot yang jauh di bawah 2,5 merupakan ciri organisasi yang lemah secara internal. Sedang jumlah nilai yang dibobot yang jauh di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat. Ketika sebuah faktor internal kunci merupakan kekuatan dan kelemahan, faktor itu harus dimasukkan dua kali dalam matriks EFI, dengan bobot dan peringkat harus diberikan untuk setiap pernyataan.

Tabel. 7 Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI)

Faktor-faktor Internal	Bobot (Xi)	Peringkat (Yi)	Nilai yang di bobot (XiYi)
Kekuatan			
1			
2			
...			
Kelemahan			
1			
2			
...			
Jumlah	1,0		

Sumber: *David, 2002*

A. Matriks SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*)

Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi wilayah. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan, strategi dan kebijakan wilayah. Dengan demikian perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT (Rangkuti,2001)

Menurut Umar (2001), matriks SWOT merupakan matching tool yang penting untuk membantu para stakeholders mengembangkan empat strategi.

Keempat strategi yang dimaksud adalah :

- a. Strategi SO (*Strenght-Opportunity*)
- b. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)
- c. Strategi ST ((*Strenght-Threat*)
- d. Strategi WT ((*Weakness-Threat*)

Sebagaimana matriks-matriks sebelumnya memerlukan key success factors, matriks SWOT pun demikian. Pada matriks ini, menentukan key success factors untuk lingkungan eksternal dan internal merupakan bagian yang sulit, sehingga dibutuhkan judgement yang baik. Sementara itu, tidak ada satupun matching tool yang dianggap paling baik. Penjelasan dari strategi di atas adalah :

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*). Strategi ini menggunakan kekuatan internal wilayah untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar wilayah. Pada umumnya, perusahaan berusaha melaksanakan strategi-strategi WO, ST, atau WT untuk menerapkan strategi SO. Oleh karena itu, jika wilayah memiliki banyak kelemahan, mau tidak mau wilayah harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat. Sedangkan jika wilayah menghadapi banyak ancaman, wilayah harus berusaha menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada.
2. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*). Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal wilayah dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Kadang kala pembangunan suatu wilayah menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang karena adanya kelemahan-kelemahan internal.
3. Strategi ST (*Strength-Threat*). Melalui strategi ini wilayah berusaha menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa wilayah yang tangguh harus selalu mendapatkan ancaman.
4. Strategi WT (*Weakness-Threat*). Strategi ini merupakan taktik untuk melakukan pembangunan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Suatu wilayah yang dihadapkan pada sejumlah kelemahan internal dan ancaman eksternal sesungguhnya berada dalam posisi yang berbahaya. Ia harus berusaha untuk tetap dapat bertahan dengan melakukan strategi-strategi lainnya misalnya liquidation.

Secara lebih jelas berikut ini adalah tahap bagaimana penentuan strategi dibangun melalui matriks SWOT. Tahapan yang dimaksud adalah :

1. Tuliskan peluang eksternal kunci perusahaan pada baris kedua kolom kesatuan
2. Tuliskan ancaman eksternal kunci perusahaan pada baris ketiga kolom kesatu
3. Tuliskan kekuatan internal kunci perusahaan pada baris kesatu kolom kedua
4. Tuliskan kelemahan internal kunci perusahaan pada baris kesatu kolom ketiga
5. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi SO pada baris kedua kolom kedua
6. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi WO pada baris kedua kolom ketiga
7. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi ST pada baris ketiga kolom kedua
8. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi WT pada baris ketiga kolom ketiga. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T. Matriks SWOT dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 8 Matriks SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan
Peluang (O)	Strategi SO <ul style="list-style-type: none"> • Strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada • Strategi agresif • Keunggulan komperatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang • Strategi orientasi putar balik • Investasi/divestasi
Ancaman (T)	Strategi ST <ul style="list-style-type: none"> • Strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman • Strategi diversifikasi • Mobilisasi 	Strategi WT <ul style="list-style-type: none"> • Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman • Kontrol kerusakan/strategi riskan

Sumber: David 2002

B. *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) atau Matriks QSPM

QSPM adalah alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan faktor-faktor sukses kritis internal-eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jadi, secara konseptual, tujuan QSPM adalah untuk menetapkan kemenarikan relatif (*relative attractiveness*) dari strategi-strategi yang bervariasi yang telah di pilih, untuk menentukan strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan (Umar,2001).

Tahapan Pengembangan QSPM dengan komponen-komponen utama dari suatu QSPM terdiri dari : *Key Factors, Strategic Alternatives, Weights, Attractiveness,*

Total Attractiveness Score dan *Sum Total Attractiveness Score*. Berikut dipaparkan mengenai langkah-langkah pengembangan suatu QSPM antara lain :

Tahap 1 : Buatlah daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan suatu wilayah dalam menjalankan suatu pembangunan di kolom sebelah kiri QSPM. Informasi ini diambil dari *EFE Matrix* dan *IFE Matrix*. Minimal sepuluh *external critical success factors* dan sepuluh *internal critical factors* dimasukkan ke dalam QSPM.

Tahap 2 : Beri *Weight* pada masing-masing eksternal dan internal *success factors*. *Weight* ini sama dengan yang ada di *EFE Matrix* dan *IFE Matrix*.

Tahap 3 : Teliti matriks-matriks pada stage 2 dan identifikasi strategi alternatif yang pelaksanaannya harus dipertimbangkan perusahaan. Catatlah strategi-strategi ini di bagian atas bari QSPM. Kelompokkan strategi-strategi tersebut ke dalam kesatuan yang *mutually exclusive*, jika memungkinkan.

Tahap 4 : Tetapkan *Attractiveness score (AS)*, yaitu nilai untuk menunjukkan kemenarikan relatif untuk masing-masing strategi yang terpilih. *Attractiveness Score* ditetapkan dengan cara meneliti masing-masing eksternal dan internal *keysuccess factors*. Tentukan bagaimana peran dari tiap faktor dalam proses pemilihan strategi yang sedang dibuat. Jika, peran dari faktor tersebut adalah besar, maka strategi-strateginya harus dibandingkan relatif pada faktor utama itu. Secara terinci, nilai *Attractiveness Score* harus ada pada masing-masing strategi untuk menunjukkan kemenarikan relatif dari satu strategi terhadap strategi lainnya. Batasan nilai *Atractiveness Score* adalah 1= tidak tertarik, 2 = agak tertarik, 3 = secara logis tertarik, 4= sangat tertarik.

Tahap 5 : Hitunglah total *Attractiveness Score*. Total *Attractiveness Score* didapat dari perkalian *Wiegth* (Tahap 2) dengan *Attractiveness Score* (Tahp 4) pada masing-masing baris. Total *Attractiveness Score* menunjukkan *relative attractiveness* dari masing-masing alternatif strategi.

Tahap 6 : Hitung Sum Total *Attractiveness Score*. Jumlah semua Total *Attractiveness Score* pada masing-masing kolom QSPM. Dari beberapa nilai TAS yang didapat, nilai TAS dari alternatif strategi yang tertinggillah yang menunjukkan bahwa alternatif strategi itu yang menjadi pilihan utama. Nilai TAS terkecil menunjukkan bahwa alternatif strategi ini menjadi pilihan terakhir.
Contoh bentuk dasar QSPM

Tabel 9. Matriks Perencanaan Strategik Kuantitatif – QSPM

Faktor-Faktor Kunci	Bobot	ALTERNATIF STRATEGI					
		Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3	
		AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
FAKTOR-FAKTOR KUNCI EKSTERNAL							
Ekonomi							
Politik Pemerintah							
Teknologi							
Budaya							
FAKTOR-FAKTOR KUNCI INTERNAL							
Manajemen							
Keuangan/Akunting							
Pemasaran							
Operasional							
Litbang							
Sistem Informasi							

Sumber: *David, 2002*

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari matriks IFE bahwa kekuatan utama dari wilayah Kabupaten Pringsewu pada faktor strategis yaitu wilayah berpotensi besar sebagai wilayah pendidikan dengan nilai skor tertinggi yaitu sebesar 0,3195 dengan fasilitas pendidikan yang tersedia dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kekuatan lainnya didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah yang kompeten pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan banyaknya industri kecil menengah (UMKM).
2. Berdasarkan hasil dari matriks IFE bahwa kelemahan utama dari wilayah Kabupaten Pringsewu ditunjukkan oleh faktor strategis kualitas sumber daya manusia yang belum merata dengan skor terendah yaitu 0,0951. Kelemahan lainnya yaitu kurangnya anggaran dana yang tersedia, sumber pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal dan sarana prasarana yang kurang memadai. Total skor dari matriks IFE untuk wilayah Kabupaten Pringsewu sebesar 3,687, sehingga menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki daya tarik kekuatan yang cukup besar, namun perlu adanya upaya untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada wilayah tersebut

3. Dari sisi eksternal, faktor yang menjadi peluang utama dari wilayah Kabupaten Pringsewu adalah perkembangan teknologi dan komunikasi dengan nilai skor tertinggi sebesar 0,3802. Dan peluang lainnya seperti kebijakan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat, adanya peraturan perundang-undangan otonomi daerah dan potensi peluang industri di era globalisasi ini.
4. Faktor eksternal yang menjadi ancaman utama wilayah Kabupaten Pringsewu adalah adanya ancaman persaingan yang ketat antara produk industri kecil menengah dengan produk perusahaan besar dengan skor tertinggi yaitu 0,203. Ancaman dari luar lainnya seperti rendahnya wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme masyarakat serta beralih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Nilai skor dari analisis matrik EFE yaitu sebesar 3,578. Nilai ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki peluang pembangunan wilayah yang besar dengan berusaha untuk memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman.
5. Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT diperoleh 16 alternatif strategi yang dirumuskan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil analisis Matriks QSP strategi yang menjadi prioritas utama, adalah Meningkatkan dan pemeratakan kualitas sumberdaya manusia guna tidak mudah terprovokasi pihak luar yang mampu menimbulkan instabilitas wilayah, Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada usia produktif agar mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan guna mengoptimalkan pengendalian aih fungsi lahan pertanian, Mengoptimalkan intensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna menambah pendapatan asli daerah, Memperbaiki sarana dan prasarana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi

B. SARAN

Wujud keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Pringsewu perlu dukungan, perhatian, dan kebijakan dari pemerintah setempat sebagai salah satu pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan masyarakat (*stakeholder*) kunci suksesnya pembangunan di wilayah Kabupaten Pringsewu. Disamping itu juga sangat besar pengaruhnya partisipasi dan kepedulian serta peran aktif masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu disarankan untuk menyusun strategi sesuai dengan tingkat kepentingan dan prioritasnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di wilayah Kabupaten Pringsewu.
2. Diperlukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat pengelolaan dan pembangunan wilayah Kabupaten Pringsewu.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat melaksanakan keenam belas (16) alternatif strategi yang telah disusun sesuai dengan tingkat kepentingan dan prioritas masing-masing wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto. 2000. *Analisis Pembangunan Wilayah Pertanian dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat)*. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. IPB. Bogor.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Bagian Penerbitan STIE YKPN : Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Pringsewu Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. Pringsewu.
- Bryant and White. 1987. *Manajemen Pembangunan : untuk Negara Berkembang*. LP3ES. Jakarta.
- David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategis Konsep*. Sindoro, Alexander, Penerjemah; Agus Widyantoro; Editor. Jakarta: Prenhallindo. Terjemahan dari: *Concepts of Strategic Management*.
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Diterjemahkan : Paul Sitohang. LPFEUI. Jakarta.
- Gunawan. 2000. *Analisis Pembangunan Ekonomi Lokal Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya*. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. IPB. Bogor
- Hanafiah, T. 1988. *Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan*. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. IPB. Bogor.
- Kuncoro, Mudjarad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Misbah, Ahmad. 2005. *Strategi Pengembangan Bisnis Gula (Studi Kasus PT Madu Baru, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta)*. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. IPB. Bogor.
- Nurjanah, Siti. 2006. *Strategi Pembangunan Wilayah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten)*. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rahman, M Arif. 2003. *Analisis Peranan Basis Sektor Pertanian Kabupaten Kuningan*. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rangkuti, Freddy. 2001. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Sjafrizal,. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sukirno,Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Suprpti. 2001. *Analisis Sektor Basis Ekonomi terhadap Penataan Ruang Kabupaten Sumenep*, Jawa Timur. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. IPB. Bogor.
- Tarigan, Robinson. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara: Jakarta
- Tjokroamidjojo, B. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. PT Gunung Agung. Jakarta.
- Todaro, P. Michael. 2002. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan. Erlangga: Jakarta.
- Tyas, R Rizki. 2006. *Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur*. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*.PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta